

**RESPON TIONGKOK ATAS PENCABUTAN PASAL 370  
KONSTITUSI INDIA TENTANG STATUS KHUSUS  
WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang  
Hubungan Internasional**



**Oleh:  
NAYLA KARIMAH  
NIM. I72216045**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
AGUSTUS 2020**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nayla Karimah

NIM : 172216045

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Respon Tiongkok atas Pencabutan Ppasal 370 Konstitusi India  
tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik dimanapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai hasil dari plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang diberikan.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan,



Nayla Karimah

**NIM. 172216045**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nayla Karimah

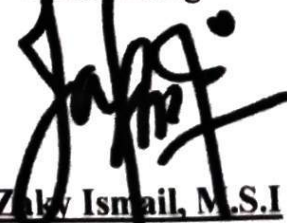
NIM : 172216045

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Respon Tiongkok atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I

NIP 198212302011011007







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nayla Karimah  
NIM : 172216045  
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Hubungan Internasional  
E-mail address : naylaokrek@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Respon Tiongkok Atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India Tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021 M

Penulis

( Nayla Karimah )

**ABSTRACT**

**Nayla Karimah**, 2020, *Chinese Response to Revocation of Article 370 of the Indian Constitution on the Special Status of Jammu and Kashmir in 2019*, Thesis of the International Relations Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** *National Interest, Chinese Response, Special Status, Jammu and Kashmir*

*This research tries to answer how China's response to the repeal of Article 370 of the Indian Constitution regarding the special status of the Jammu and Kashmir region in 2019. The method used is descriptive qualitative with interviews and documentation as data collection techniques. This study uses a diplomatic approach with the concept of national interest according to Morgenthau as a knife of analysis, China's response to the repeal of Article 370 of the Indian Constitution is in accordance with the concept of national interest according to Morgenthau. China's national interests lead to national security and protection of the country's sovereignty. In addition, China's response is more diplomatic than positive because it has an impact on the existence of China's territory, namely Aksai Chin. The reason is that the national interests and national benefits obtained by China tend to be less and more likely to threaten China's sovereign territory.*







G. Kerangka Konseptual .....	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	22
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
3. Subyek dan Objek Penelitian.....	24
4. Tahap-tahap Penelitian.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
6. Teknik Analisa Data .....	30
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data.....	31
F. Argumentasi Utama.....	32
G. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II: INTERVENSI TIONGKOK DI JAMMU DAN KASHMIR .....</b>	<b>35</b>
A. Pembagian <i>Line of Control</i> Wilayah Jammu dan Kashmir .....	35
B. Keterlibatan Tiongkok di Jammu dan Kashmir .....	39
C. Kepentingan Tiongkok di balik OBOR ( <i>One Belt One Road</i> ).....	44
<b>BAB III: PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN</b>	
<b>KASHMIR.....</b>	<b>48</b>
A. Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang Status Khusus Wilayah	
Jammu dan Kasmir.....	48
B. Dampak Pencabutan Pasal 370 Bagi Tiongkok .....	50
<b>BAB IV: STRATEGI DAN RESPON TIONGKOK ATAS PENCABUTAN</b>	
<b>STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR.....</b>	<b>52</b>
1. Strategi Tiongkok dalam Merespon Isu Kashmir .....	52







**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Outline Wawancara 68	
1. Wawancara Narasumber 1 .....	77
2. Wawancara Narasumber 2 .....	79
Lampiran 2: Artikel 370 Konstitusi India tentang Status Khusus wilayah Jammu dan Kashmir .....	82















pencabutan Pasal 370 Konstitusi India adalah untuk mengintegrasikan Kashmir dan meletakkannya pada posisi yang sama dengan seluruh wilayah India.<sup>14</sup>

Hal ini memunculkan beberapa respon dari kritikus dan beberapa negara, mereka menentang langkah tersebut dimana mereka menganggap bahwa penghapusan Pasal 370 Konstitusi India berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang sedang dihadapi India saat ini. Mereka mengatakan bahwa langkah tersebut memberikan pengalihan yang sangat dibutuhkan bagi pemerintah India.<sup>15</sup>

Sementara pada peristiwa ini Tiongkok menganggap bahwasanya India telah melukai kedaulatan Tiongkok dengan mengubah hukum domestik secara sepihak, melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Yang menjadi masalah bagi Tiongkok saat ini adalah apa yang akan terjadi dengan Aksai Chin yaitu hamparan padang pasir dataran tinggi luas yang menjadi wilayah klaim dan kekuasaan Tiongkok.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019 sehubungan dengan kepentingan nasional Tiongkok mengenai kedaulatan negaranya yang terganggu.

---

<sup>14</sup> Matapolitik. 2019. "Pencabutan Pasal 370: Ketika Kashmir Tak Lagi Istimewa" diakses 4 Desember 2019, <https://www.matapolitik.com/cabut-pasal-370-ada-apa-dengan-Kashmir-dan-signifikansi-bagi-pakistan-news/>.

<sup>15</sup> BBC.news. 2019. "Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir Oleh India dianggap Kontroversial? Tiga yang Layak diketahui" diakses 4 Desember 2019 <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia>.

<sup>16</sup> Matapolitik. 2019. "Dibanding India dan Pakistan, China Lebih Paham Risiko di Kashmir" diakses 4 Desember 2019, <https://www.matapolitik.com/bukan-india-atau-pakistan-china-tampak-lebih-paham-risiko-di-Kashmir-analisis/>.

















menggunakan Kashmir yang diduduki Pakistan sebagai rute transit antara Xinjiang dan pelabuhan Pakistan di Laut Arab.

Penelitian ketiga adalah karya Reksi Merindo dalam *Analisis Respon Tiongkok dalam Sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018)*.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan skripsi program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini membahas respon Tiongkok dalam sengketa nuklir Korea Utara pada masa kepemimpinan Xi Jinping menggunakan teori *rational choice* dari *rational actor*. Dalam penelitian ini, Tiongkok memilih untuk mengaplikasikan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara didasari atas keamanannya yang terganggu sehingga membuat Tiongkok mengalami dilema. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana peneliti memilih menggunakan konsep kepentingan nasional.

Penelitian keempat adalah karya Heri Kurniawan dalam *Konflik India Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)*.<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan skripsi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi timbulnya konflik antara India dan Pakistan dalam memperebutkan Kashmir secara historis dalam pandangan aspek politik. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat resolusi melalui plebisit yang sesuai dengan resolusi yang termuat dalam PBB pada perang yang terjadi

---

<sup>25</sup> Reksi Merindo. "Analisis Respon Tiongkok dalam Sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018)" skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2019.

<sup>26</sup> Heri Kurniawan. "Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)", Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.





negara-negara yang berfokus kepada pengambilan keputusan pada situasi apapun. Peneliti ini menggunakan perspektif realisme dalam hubungan internasional dan konsep keamanan nasional. Berbeda dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif realisme. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsinya adalah sama-sama menggunakan tingkat analisis negara.

Penelitian kedelapan adalah karya Nurhasanah dalam *Dampak Peristiwa Bom Mumbai November 2008 terhadap Penyelesaian Konflik Kashmir antara India dan Pakistan Periode 2008-2012*.<sup>30</sup> Penelitian ini merupakan skripsi prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak peristiwa bom Mumbai November 2008 terhadap penyelesaian konflik antara India dan Pakistan periode 2008-2012. Penelitian ini merupakan skripsi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kerangka teoritis yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori konflik. Konsep kepentingan dan konsep keamanan nasional. Metode yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan.

Berbeda dengan skripsi penulis yang bertujuan untuk menganalisis menganalisis bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Selain itu

---

<sup>30</sup> Nur Hasanah. "Dampak peristiwa bom Mumbai November 2008 Terhadap Penyelesaian Konflik Kashmir antara India dan Pakistan Periode 2008-2012". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014.





Pada intinya Tiongkok memberikan respon yang bersifat diplomatik, berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pencabutan status khusus wilayah yang melibatkan Jammu dan Kashmir. Karena tiap negara juga memiliki tanggung jawab secara internasional untuk tidak mengganggu batas wilayah kedaulatan negara lain. Sedangkan dalam kasus pencabutan status khusus tersebut, Tiongkok merasa menjadi pihak ketiga yang secara tidak sengaja terlibat dikarenakan dalam penentuan wilayah secara geografis yang sempat terjadi konflik bersenjata memberikan dampak yang melewati batas negara hingga Tiongkok.

Penelitian ke sepuluh yang dimuat, adalah karya dari Nur Amani Adi Putri dalam *Respon Tiongkok terhadap Penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan (2016-2018)*.<sup>33</sup> Penelitian ini merupakan skripsi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon Tiongkok dalam menyikapi penempatan THAAD milik Amerika Serikat di Korea Selatan tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan kacamata realism dengan konsep *security dilemma* dalam realisme dan kepentingan nasional. Berbeda dengan skripsi dilakukan peneliti yang menggunakan konsep kepentingan nasional dengan pendekatan diplomatik.

---

<sup>33</sup> Nur Amani Adi Putri. "Respon Tiongkok terhadap penempatan terminal high altitude area defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan (2016-2018)". Skripsi. Universitas Lampung. Lampung: 2019.































Isi pendahuluan yang terdapat pada bab pertama merupakan awal dari penelitian. Bagian ini tidak lain berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kerangka konseptual atau konsep yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan subjek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai landasan berfikir dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan subjek atau variabel penelitian. Selanjutnya, meliputi tahap-tahap penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, tingkat analisa (*level of analysis*), Teknis analisa data, Teknik pengujian keabsahan data dan teknik pengumpulan data, argumentasi utama dan sistematika pembahasan dalam melakukan penelitian.

Pada bab dua hingga bab keempat, berisi tentang penyajian data pada bab ini akan mulai memaparkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian pada bab kelima terdapat analisa data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa seluruh data yang sudah diperoleh oleh peneliti dengan konsep atau teori yang akan diterapkan dan sudah dipilih sebelumnya. Pada bab ini, penulis memposisikan konsep sebagai alat dalam mendefinisikan data yang ditemukan oleh peneliti.

Kemudian adalah bab terakhir atau penutup yang mana bagian ini mempunyai isi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Isi dari kesimpulan diambil dari analisis peneliti dalam menjawab

















tiga negara yaitu India, Pakistan dan Tiongkok. India disebut sebagai wilayah Jammu dan Kashmir, terdiri dari Baltistan (Kargil, Drass dan Turtuk) dan mengontrol sekitar 45.62% wilayah Kashmir. Pakistan disebut sebagai POK (*Pakistan Occupied Kashmir*) yang terdiri dari wilayah utama Baltistan yang saat ini disebut *Northern Areas* dan sebuah unit administrative yang terpisah bernama Azad Jammu dan Kashmir dan mengontrol 35.155% wilayah Kashmir. Sedangkan, 19.23% wilayah Kashmir lainnya di control oleh Tiongkok, diantaranya adalah Demchok, Shaksgam Valley dan Aksai Chin.

Ada dua permasalahan perebutan perbatasan antara India dan Tiongkok yaitu Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Aksai Chin adalah dataran yang dulu dan sekarang hampir tidak berpenghuni dan salah satu dari dua permasalahan atas perebutan perbatasan antara India dan Tiongkok, terletak di wilayah persatuan India di Ladakh atau wilayah otonomi Xinjiang dan merupakan bagian dari konflik Kashmir. Minat Tiongkok kepada Kashmir berkembang setelah pengembalian Tibet pada 1950 dan klaim terkait Aksai Chin di Ladakh di sisi India Jammu dan Kashmir, Huanza dan lembah Shaksgam di POK (*Pakistan Occupied Kashmir*).

Tiongkok yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa ini jelas mempunyai kepentingan langsung, terutama semenjak Tiongkok mendapatkan persetujuan dari Pakistan untuk menguasai wilayah Aksai Chin yang merupakan wilayah bekas Kashmir. Tiongkok menduduki Aksai Chin pada perang 1962 dan telah mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Pada

1963 Pakistan menyerahkan sebagian Gilgit-Baltistan ke Tiongkok sehingga memberikan lebih banyak akses dalam Jammu dan Kashmir.<sup>58</sup>

Aksai Chin diklaim oleh dua negara yaitu India dan Tiongkok, Tiongkok ingin mempertahankan status Aksai Chin sebagai bagian dari wilayahnya dengan membawa masalah tersebut pada forum informal DK PBB pada 20 Agustus 2019. Tiongkok menginginkan bahwa pengklaiman wilayah Aksai Chin diakui karena Tiongkok pernah memenangkan perang melawan India dan mengklaim wilayah tersebut. Peristiwa tersebutlah yang membuktikan bahwa Aksai Chin penting bagi Tiongkok.

Sebaliknya oleh India, Aksai Chin adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan karena wilayah tersebut merupakan wilayah bekas kerajaan Kashmir yang diklaim sebagai milik India. Atas dasar tersebut, maka keputusan India mencabut Pasal 370 Konstitusi India jelas mengganggu Tiongkok karena sama-sama mengancam kedaulatannya.

---

<sup>58</sup> Dipanjan Roy Chaudhury. 2019. "China Raked Up Status of Aksai Chin at UNSC Informal Session" (online) diakses 23 Maret 2020, [https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unsc-informal-session/amp\\_articleshow/70747053.cms](https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unsc-informal-session/amp_articleshow/70747053.cms).

























Beberapa kebijakan Tiongkok di Kashmir tersebut merupakan upaya untuk kepentingan suatu negara dan melibatkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan Tiongkok, India dan Pakistan. Hal ini memerlukan upaya untuk menyeimbangkan Tiongkok diantara kedua negara tersebut dan untuk mengikat lebih jauh atas kepentingannya dengan kedua negara tersebut. Tujuan Tiongkok adalah membangun relasi dengan semua negara di Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan.

Di dalam catatan sejarah Tiongkok dan Pakistan memiliki keterkaitan satu sama lain. Ditambah dengan Pakistan pernah memberikan sebagian wilayahnya kepada Tiongkok. Pada proyek OBOR Tiongkok, Pakistan merupakan mitra penting Tiongkok. Tiongkok memberikan investasi sebanyak \$ 90 miliar dalam kerjasama OBOR dan sekitar sepetiganya \$ 27 miliar telah diberikan kepada Pakistan. Tiongkok juga terus memberikan bantuan kepada Pakistan atas upaya keamanan nasional Pakistan terlepas dari hubungan India-Pakistan.

Tidak hanya itu, proyek CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) yang sedang berlangsung. “Jendral Xu Qiliang menyampaikan salam hangat dari Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang serta menegaskan kembali dukungan penuh Tiongkok untuk Pakistan, khususnya pada saat isu Kashmir



## **B. RESPON DIPLOMATIK TIONGKOK ATAS PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR**

Setelah dicabutnya Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019 berbagai pihak telah merespon hal tersebut, salah satunya adalah negara yang berdekatan dengan India dan Pakistan yaitu Tiongkok. Tiongkok merespon atas terjadinya peristiwa tersebut karena Tiongkok menganggap bahwa dicabutnya Pasal tersebut telah mengganggu kedaulatan wilayahnya dilihat dari segi perbatasan wilayah, dikarenakan apabila Pasal 370 Konstitusi India dicabut maka seluruh wilayah India termasuk Jammu dan Kashmir harus menaati konstitusi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah India.

Sedangkan Tiongkok telah mengklaim bahwa wilayah Aksai Chin adalah milik Tiongkok tetapi India juga mengklaim bahwa Aksai Chin adalah milik India. Dari situlah Tiongkok khawatir bahwa Aksai Chin akan diambil dan dikuasai oleh India. Sedangkan Tiongkok sendiri mengeluarkan beberapa respon atas peristiwa pencabutan Pasal 370 Konstitusi India, antara lain pada saat forum PBB, di berita internasional maupun di web pemerintahan dengan respon diplomatik melalui pernyataan-pernyataan dari Presiden XI Jinping, Menteri Luar Negeri Wang Yi beserta Jubirnya dan dewan Zhang Jun, dewan perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB. Respon yang dikeluarkan oleh Tiongkok juga dilakukan tak hanya satu kali tetapi dilakukan beberapa kali.

Respon diplomatik yang dilakukan Tiongkok antara lain, yaitu pada 6 Agustus 2019 dengan langsung merespon isu tersebut. Respon Tiongkok

terhadap pengumuman di Delhi berkaitan dengan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir terlihat melalui komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok bahwa Tiongkok menyoarakan posisi yang tegas dan konsisten yang tidak berubah, Tiongkok menganggap bahwa bagian dari Ladakh sebagai wilayah Tiongkok, dan India tidak boleh secara sepihak menciptakan fakta di lapangan melalui hukum domestik.<sup>73</sup>

Respon selanjutnya yaitu pada 9 Agustus 2019, anggota dewan negara Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pertemuan dengan Menteri luar negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi di Beijing untuk kunjungan khusus dan darurat. Dalam pertemuan tersebut Wang Yi mengatakan bahwa masalah Kashmir adalah perselisihan yang lahir dari sejarah kolonial wilayah itu dan harus ditangani dengan cara damai sesuai dengan piagam PBB, resolusi yang relevan dari DK PBB.<sup>74</sup>

Respon Tiongkok berikutnya yaitu pada 16 Agustus 2019, di markas PBB yang terletak New York. Zhang Jun, selaku Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa masalah Kashmir harus diselesaikan dengan baik melalui cara damai sesuai dengan resolusi DK PBB terkait perjanjian bilateral antar kedua negara. Zhang juga menganggap bahwa amandemen konstitusi yang dilakukan oleh India telah mengubah status quo di Kashmir dan menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. Zhang juga mengatakan bahwa langkah India juga telah menentang kepentingan kedaulatan Tiongkok dan

---

<sup>73</sup>M.K. Bhadrakumar. 2019. "Bagaimana China Tanggapi Pencabutan Status Khusus Kashmir oleh India?" diakses 22 April 2020 <https://www.matapolitik.com/bagaimana-china-tanggapi-pencabutan-status-khusus-Kashmir-oleh-india-analisis/>.

<sup>74</sup>Huaxia. 2019. "China Calls on Avoidance of Unilateral Actions on Kashmir Issues"( diakses 27 Februari 2020 [https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/09/c\\_138297101.htm](https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/09/c_138297101.htm)).











Jammu dan Kashmir wilayah anak benua India di barat laut. Wilayah ini dibatasi oleh wilayah otonomi Uygur Xinjiang di timur laut dan wilayah otonomi Tibet di timur (keduanya bagian dari Tiongkok), sedangkan di selatan berbatasan dengan negara bagian India Himachal Pradesh dan Punjab, di barat berbatasan dengan Pakistan.

Wilayah Jammu dan Kashmir mempunyai luas total sekitar 85.800 mil persegi (222.200 km persegi). Wilayah Jammu dan Kashmir memiliki keuntungan di bidang ekonomi, seperti objek wisata yang indah, pusat industri wol, karpet dan memiliki tanah yang subur. Letak wilayahnya yang strategis juga menjadikannya mempunyai keuntungan geopolitik. Keadaan inilah penyebab Jammu dan Kashmir menjadi subyek perselisihan antara India dan Pakistan sejak pembagian anak benua India pada 1947 hingga saat ini dan tidak heran apabila wilayah ini sangat diperebutkakan oleh negara-negara yang terletak disekitarnya seperti Tiongkok, India dan Pakistan.<sup>79</sup>

Konsep yang digunakan peneliti sebagai pisau analisa adalah konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau dengan menggunakan pendekatan diplomatik. Maksud konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh peneliti, konsep kepentingan nasional yang dimaksud didasarkan dari tujuan negara serta ambisi suatu negara untuk dapat mempertahankan ekonomi, militer atau budaya negara tersebut. Kepentingan

---

<sup>79</sup> Encyclopaedia Britannica. "Kashmir, Region, Indian Subcontinent, Asia" diakses 12 Maret 2020, <https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-indian-subcontinent/The-Kashmir-problem>.

nasional juga bersifat fleksibel, yang berarti dapat berubah dan diubah sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi negara dan masyarakatnya.

Sedangkan pendekatan diplomatik yang digunakan peneliti adalah dengan cara mengetahui dari sisi diplomatik bagaimana Tiongkok merespon pencabutan Pasal 370 Konstitusi India. Dalam kaitannya dengan respon Tiongkok atas pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir, konsep kepentingan nasional tentu saja sesuai untuk diterapkan. Tiongkok adalah salah satu negara di Asia Timur yang berpengaruh di seluruh dunia.

Walaupun Tiongkok terletak di kawasan Asia Timur, tetapi Tiongkok juga berperan di kawasan Asia Selatan bertetangga dengan Pakistan dan India. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Tiongkok memiliki peran penting di kawasan tersebut. Hubungan Tiongkok, India dan Pakistan bisa dikatakan baik, contohnya adalah Tiongkok dan Pakistan mempunyai kerjasama dalam bidang ekonomi yang disebut CPEC (*China-Pakistan Economic Corridor*). Dengan India, Tiongkok juga menjalin kerjasama ekonomi dengan baik.

Tiongkok juga merupakan negara pesaing India di pasar Asia. Kedua negara tersebut adalah negara yang mengalami kebangkitan di bidang ekonomi dilihat dari segi PDB (Produk Domestik Bruto) yang meningkat. Tiongkok melihat bahwasanya India adalah pesaing utama yang dapat mengambil peran



Prinsip tanggung jawab internasional juga telah diatur mengenai bagaimana peranan tiap negara untuk turut saling menghargai kehormatan negara lain dengan tidak ikut campur urusan negara yang bukan dalam batas kewenangannya. Karena dampak yang bisa muncul akan sangat beragam berdasar pada bagaimana suatu negara terbiasa menanggapi suatu kasus.

Hubungan kerjasama negara, hubungan diplomatik, berpotensi untuk tidak diteruskan atau diperpanjang jika suatu negara memiliki konflik dengan negara lain. Dalam kasus Jammu dan Kashmir yang diperebutkan wilayahnya oleh Pakistan dan Tiongkok ini, negara juga dapat dikenakan *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* jika negara yang terkena dampak nantinya menuntut keadilan dari negara yang menyebabkan timbulnya suatu konflik. Namun yang paling ditekankan oleh peneliti adalah bagaimana negara sebagai subjek hukum internasional selain mampu merepresentasikan negaranya sendiri juga mampu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, dengan menjaga kegiatan negaranya tanpa mengganggu wilayah yurisdiksi negara lain, dan tentunya menyelesaikan sengketa antar negara dengan prosedur yang benar agar tidak memberikan dampak yang merugikan bagi negara lain.

Jika suatu negara berkonflik dengan negara lain, akibat yang ditimbulkan selain merugikan negara itu sendiri secara geografis dan kewilayahan, dampak lainnya yang dapat ditimbulkan yakni akan merenggangnya hubungan diplomatik antar negara yang saling bekerjasama. Sedangkan hubungan diplomatik tidak hanya mencakup pada kegiatan politis dan kewilayahan saja,













BBC News 2019. "Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters" diakses 6 Desember 2019 <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india>.

BBC.news. 2019. "Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India dianggap Kontroversial? Tiga yang Layak diketahui" diakses 4 Desember 2019 <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/>

Burhan Hakim, Ahmad. 2015. "Analisa Konflik Perbatasan (Kashmir) India-Pakistan" diakses 9 Desember 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/www.burhanhernandez.com/analisa-konflik-perbatasan-kashmir-india-pakistan>.

Chaudhury , Dipanjan Roy. 2019. "China Raked Up Status of Aksai Chin at UNSC Informal Session" diakses 23 Maret 2020, [https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unscc-informal-session/amp\\_articleshow/70747053.cms](https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unscc-informal-session/amp_articleshow/70747053.cms).

Cpec. "Highways Network of CPEC, Monographic Study on Transport Planning 2013-2030" diakses 7 April 2020. <https://cpec.gov.pk/map/single/1>.

Das, Pushpita. "Issues in the management of the India-Pakistan International border" diakses 10 Juli 2020 <https://doi.org/10.1080/09700161.2014.895235>.

Dayana Anggit Setiyani. 2019. "Sejarah Konflik Kashmir, Perang Antara India-Pakistan" diakses 15 Agustus 2019,









- Garyer, John W. 2004 “ China’s Kashmir Policies” India review, vol 3, no.1.  
Taylor & Francis Inc. 1
- Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”,  
Vol. XIII, No. 2, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Singh, Santosh. 2012. “China’s Kashmir Policy”. Vol.16, No. 2. Worls Affairs:  
The Jornal of International Issues”
- Khairani, Oci.”Kepentingan India Menolak One Belt One Road (OBOR)  
Tionggok pada tahun 2017-2019,” JOM FISIP Vol.6. (2019).
- Mohan, C. Raja. “Soft Borders and Cooperative Frontiers: India’s Changing  
Territorial Diplomacy Towards Pakistan and China.”Journal Strategic  
Analysis (2007)”  
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700160701353399>.
- Rachmawati, Imami Nur, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif:  
Wawancara”. Vol. 11 , No.1, Jurnal Keperawatan Indonesia,Universitas  
Indonesia.
- Rizky, Alfy. 2016. “Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir terhadap Hubungan  
Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013” JOM FISIP Vol 3 No.2 .1  
Universitas Riau
- Wangke, Humphrey. 2015. “Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia  
Pasifik Melalui Pembentukan AIIB”. Vol.VII, No. 07/I/P3DI/April/2015  
hlm 5-6. Pengolahan data dan informasi (P3DI), secretariat jendral DPR  
RI.

**Artikel**

Ganguly, Sumit, Michal Smetana, Sannia Abdullah dan Ales Karmazin. "India, Pakistan, and The Kashmir Dispute: Unpacking The Dynamics of a South Asian Froze Conflict". GmbH Germany, Jerman: 201

Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elite". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

Information Service of India, "Masalah Kashmir", Djakarta: Information Service of India.

Katherina, Commodore Richards, CSC, RAN. "China-India: an Analysis of The Himalayan Territorial Dispute" Centre for Defence and Strategic Studies. 2015.

Mashad, Dhurorudin, " Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Monika krisna dan Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd. "Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)". Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2017.

Muratbekova, Albina. "The Sino-Indian border issue as a factor for the development of bilateral relations". R.B.Suleimonev Institute of Oriental Studies, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan. 2017.

